

**ANALISIS SISTEM AKUNTANSI PEMBERIAN KREDIT MULTIGUNA  
SEBAGAI SALAH SATU UPAYA MEMINIMALISIR KREDIT BERMASALAH  
(STUDI PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGGARA  
CABANG UTAMA)**

**Nitri Mirosea<sup>1</sup>, Yuli Lestari Labangu<sup>2</sup>, Ersa Mayora Putri Amalia<sup>3</sup>**  
Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Halu Oleo<sup>1,2,3</sup>  
*e-mail* : [nitri.mirosea@uho.ac.id](mailto:nitri.mirosea@uho.ac.id)<sup>1</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan sistem akuntansi pemberian kredit multi guna yang diterapkan di PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Utama. Informan dalam hal ini pegawai bagian kredit pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Utama dan nasabah/debitur kredit multiguna. Data primer yang digunakan dapat berupa informasi tentang perusahaan. Metode Pengumpulan data ialah Wawancara semi terstruktur dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, penerapan sistem akuntansi pemberian kredit multi guna pada Bank Sultra Cabang Utama sebagai salah satu upaya meminimalisir kredit bermasalah telah terlaksana dengan cukup baik. Hal itu dapat dilihat dari petugas yang terlibat sangat kompeten dan dapat dipercaya. Serta pengetahuan dan kemampuan yang dibangun dari program-program yang telah dijalankan mulai dari perekrutan pegawai hingga evaluasi kinerja setiap harinya oleh ketua bidang.

**Kata kunci:** Kredit Bermasalah;Kredit Multiguna;Sistem Akuntansi

**ABSTRACT**

*Multipurpose credit is the provision of credit for all the needs of the debtor as long as it does not conflict with applicable legal regulations, which is given to members of the public who have a fixed income. The aim of this research is to describe the accounting system for granting multi-purpose loans applied at PT. Regional Development Bank of Southeast Sulawesi Main Branch. The informant, in this case, is an employee of the credit department at PT. Regional Development Bank of Southeast Sulawesi Main Branch and multipurpose credit customers/debtors. Primary data used can be in the form of information about the company. Data collection methods are semi-structured interviews and documentation. The analytical method used is descriptive analysis. The results showed that the application of the accounting system for granting multi-purpose credit at the Main Branch of Bank Sultra as an effort to minimize non-performing loans has been carried out quite well. This can be seen from the officers involved who are very competent and trustworthy. As well as the knowledge and skills that are built from the programs that have been implemented starting from employee recruitment to daily performance evaluation by the head of the field.*

**Keywords:** *Non-Performing Loan; Multipurpose Credit; Accounting System*

## **1. PENDAHULUAN**

Perbankan disebut sebagai lembaga penunjang dan pendorong kelancaran dunia usaha. Perkembangan dalam dunia usaha juga harus diikuti dengan perkembangan di dunia perbankan, Peran perbankan dalam membangun ekonomi merupakan salah satu sektor yang diharapkan berperan aktif dalam penyediaan modal dalam bentuk kredit yang digunakan untuk pengembangan usaha. Sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 Bank adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana dari masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Sebagai suatu perusahaan, bank mempunyai tujuan untuk memperoleh keuntungan, antara lain diperoleh dari aktivitas kredit. Kredit merupakan sarana penyaluran dana bank yang ditanam oleh pihak ketiga dengan persetujuan tertentu dalam bentuk besarnya pokok pinjaman yang diberikan, tingkat suku bunga pertahun, dan jangka waktu pelunasan serta tata cara pelunasannya. (Yolla, 2019) Dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat bank menyediakan berbagai jenis kredit dalam penerapannya. Baik kredit yang dilihat berdasarkan segi kegunaannya, modal kerja, jangka waktu, jaminan dan kredit dalam sektor usaha. (Oktaviani I, 2014)

Kredit multiguna memiliki proses yang tidak berbelit-belit dan cepat. Kredit multiguna adalah pemberian kredit untuk segala keperluan debitur selama tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, yang diberikan kepada anggota masyarakat yang mempunyai penghasilan tetap (Bank Sultra, 2012). Nasabah dari kredit multiguna tersebut biasanya sudah memiliki rekening bank yang bersangkutan. Hal tersebut dikarenakan angsuran untuk melunasi kreditnya dipotong dari gaji melalui rekening debitur yang telah ada kerjasama MOU dengan bank yang bersangkutan. Kredit yang telah diberikan kepada debitur haruslah berjalan lancar, baik produktif maupun konsumtif. Lancar disini maksudnya dibayarnya angsuran pokok beserta bunga dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Menurut Darmawi (2012:104), tidak ada pemberian kredit tanpa risiko. Selalu saja ada kemungkinan munculnya resiko. Oleh karena itu, risiko ini harus diminimalisir mengingat terbatasnya dana yang tersedia dibandingkan dengan permintaan kredit merupakan salah satu masalah yang dihadapi perbankan dewasa ini selain kredit macet (Dikdik, 2005).

Kredit-kredit yang diberikan oleh bank perlu diamankan. Tanpa adanya pengamanan, bank sulit mengelakkan risiko yang datang. (Edy, 1989:38). Salah satu cara untuk meminimalisir risiko kredit yaitu dengan cara melakukan pengamanan. Pengamanan merupakan suatu mata rantai kegiatan bank. Langkah pengamanan ini dimulai sejak bank merencanakan untuk memberikan kredit (Sinungan, 1983:155). Pengamanan terhadap kredit-kredit yang diberikan bank tersebut menyatakan bahwa begitu pentingnya ketelitian dalam menganalisa suatu persyaratan atau kebijaksanaan terhadap suatu kredit yang akan diberikan, maka diperlukan suatu prosedur pemberian kredit yang benar, sesuai dengan sistem akuntansi pemberian kredit yang ada. Tujuan utama pengamanan tersebut adalah untuk menjaga, mengamankan, dan mengantisipasi terjadinya kredit bermasalah.

Menurut Dikdik (2005), risiko kredit dapat dihindari dengan adanya sistem informasi akuntansi yang memadai dalam proses pemberian kredit dengan kata lain diperlukan suatu sistem yang dapat menunjang efektivitas pelaksanaan pemberian kredit. Prosedur pemberian yang benar dilakukan mulai debitur mengajukan kredit. Prosedur harus dilakukan secara benar dan konsisten dari awal sampai akhir dan sama rata kepada semua debitur. Setelah prosedur pemberian, pengawasan juga dilakukan dalam rangka pengamanan kredit. Pengawasan bertindak sebagai pengendali lembaga keuangan untuk mengamankan asetnya dari kemungkinan-kemungkinan buruk yang terjadi yang dihasilkan dari tunggakan kredit. Pengawasan juga harus dilakukan dengan prosedur yang benar. Semua dilakukan transparan dan merata. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan sistem akuntansi pemberian kredit multi guna yang diterapkan di PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Utama.

## 2. LANDASAN TEORITIS

### Sistem Akuntansi

Sistem berasal dari bahasa Yunani “*system*” yang memiliki arti himpunan bagian atau unsur yang saling berhubungan secara teratur untuk mencapai tujuan bersama. Definisi sistem menurut Baridwan (2002:3) adalah suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh, untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi yang utama. Indrajit (2001:2) mendefinisikan sistem sebagai kumpulan-kumpulan dari komponen-komponen yang dimiliki unsur keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Dari beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa biaya merupakan kas atau nilai ekuivalen kas yang dikeluarkan atau dikorbankan oleh perusahaan untuk mendapatkan barang atau jasa dalam rangka untuk memperoleh penghasilan (*revenue*) atau untuk memperoleh manfaat tertentu di masa yang akan datang.

Pengertian sistem akuntansi dengan sistem tidak jauh berbeda, hanya saja dalam akuntansi dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas pencatatan akuntansi. Sistem Akuntansi dapat diartikan sebagai formulir-formulir, catatan-catatan, prosedur-prosedur, dan alat-alat yang digunakan untuk mengolah data mengenai usaha suatu kesatuan ekonomis dengan tujuan untuk menghasilkan umpan balik dalam bentuk laporan-laporan yang diperlukan oleh manajemen untuk mengawasi usahanya, bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan seperti pemegang saham, kreditur, dan lembaga-lembaga pemerintahan untuk menilai hasil operasi (Baridwan, 2002:4).

### Pengendalian Kredit

Pengendalian kredit pada setiap bank sangat penting karena dapat menjaga sistem pemberian kredit yang telah berjalan dari pemborosan waktu, tenaga maupun dana. Menurut Hasibuan (2006:105) Pengendalian kredit adalah usaha-usaha untuk kredit yang diberikan tetap lancar, produktif dan tidak macet. Lancar dan produktif disini maksudnya angsuran kredit yang telah ditentukan selalu terbayar hingga jumlah kredit dapat ditarik kembali. Hal ini membuktikan bahwa pengendalian kredit dapat mencegah terjadinya kredit macet. Oleh karena itu penyaluran kredit harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan dengan sistem yang baik dan benar.

Beberapa jenis pengendalian kredit menurut Hasibuan (2006:106) yang diterapkan dalam pelaksanaannya, antara lain: a). *Preventive control of credit* yaitu Pengendalian kredit yang dilakukan dengan tindak pencegahan sebelum kredit tersebut macet; b). *Repressive control of credit* yaitu pengendalian kredit yang dilakukan melalui tindakan penagihan/ penyelesaian setelah kredit tersebut macet. Tegasnya kredit macet harus diselesaikan dengan cara menyita agunan kredit bersangkutan untuk membayar pinjaman debitur.

### Kredit Multiguna

Kredit Multiguna (KMG) adalah fasilitas kredit yang diberikan kepada individu yang memiliki pendapatan atau penghasilan tetap maupun tidak tetap, yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan konsumtif (*consumptive purpose*) yang tidak dapat dilayani dengan skim Kredit Perumahan (KPR) dan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) maupun kredit konsumtif lainnya. Tujuan pemberian kredit multiguna adalah untuk memudahkan pembiayaan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan konsumtifnya. Pasar sasaran kredit multiguna antara lain: a) Individu berpenghasilan tetap seperti Pegawai BUMN/ BUMD yang bonafid, Pegawai Negeri Sipil/ TNI/ Polri, Pegawai Perusahaan Swasta yang bonafid; b) Individu berpenghasilan tidak tetap seperti Pengusaha/ Wiraswasta/ Pedagang, Golongan Profesional antara lain Dokter/ Bidan, Akuntan, Notaris, Pengacara, Konsultan, Artis/ Seniman, Petani, dll.

### Kredit Bermasalah

Kredit bermasalah merupakan salah satu indikator kunci untuk menilai kinerja fungsi bank dan kesehatan kualitas asset bank. Kredit yang disebut sebagai kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet. Menurut Hasibuan (2007:115) Kredit bermasalah adalah kredit yang diklasifikasikan pembayarannya tidak lancar yang dilakukan oleh debitur bersangkutan.

Surat edaran Bank Indonesia Nomor 12/11/DPNP Tanggal 31 Maret 2010, kredit bermasalah *Non Performing Loan* dapat dihitung dengan rumus:

$$NPL = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

Bank Indonesia melalui peraturan Bank Indonesia Nomor 13/3/PBI/2011 tentang penetapan status dan tindak lanjut pengawasan bank menetapkan bahwa rasio kredit bermasalah (*Non Performing Loan*) pada setiap bank tidak boleh melebihi ketentuan maksimal, dari Bank Indonesia yaitu 5%, apabila lebih dari 5% dari total kredit atau total pembiayaan maka bank tersebut dianggap tidak sehat. NPL yang dimiliki suatu bank semakin meningkat maka akan menyebabkan menurunnya laba yang akan diterima oleh bank. Berbagai problem yang dihadapi Bank berkaitan dengan penyaluran kredit, biasanya disertai pula dengan meningkatnya kredit bermasalah atas kredit yang diberikan. Kredit bermasalah dalam istilah perbankan disebut *Non Performing Loan (NPL)*. Untuk itu, perlu adanya kebijakan dalam pemberian kredit yang tepat untuk mengatasi problem yang ada. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sistem akuntansi pemberian kredit multiguna dalam upaya meminimalisir kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* pada pemberian kredit yang diterapkan oleh Bank Sultra pada Bulan Desember 2021, Maret 2022, dan Juni 2022, dengan menggunakan kebijakan pada pemberian kredit sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia terkait dengan kelayakan nasabah dalam memperoleh kredit.

### 3. METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian yaitu PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Utama yang beralamat di Jalan Mayjend Soetoyo No. 95 Kota Kendari - Sulawesi Tenggara. Sedangkan objek penelitian ini adalah sistem akuntansi pemberian kredit multiguna yang diterapkan di bank tersebut untuk meminimalisir kredit bermasalah.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data kualitatif dan data kuantitatif, yaitu:

a. Data Kualitatif

Data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah sejarah singkat perusahaan dan sistem akuntansi pemberian kredit multiguna pada bank tersebut sebagai salah satu upaya meminimalisir kredit bermasalah pada bulan Desember 2021, Maret 2022, dan Juni 2022. Informasi yang didapatkan dari hasil wawancara dengan pegawai atau pihak perusahaan bagian kredit pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Utama.

b. Data Kuantitatif

Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua data yang sifatnya angka-angka yang berkaitan dengan data Kredit Bermasalah pada Bank Sultra bulan Desember 2021, Maret 2022, dan Juni 2022 serta data Perubahan Non Performing Loan (NPL Gross) pada Bank Sultra bulan Desember 2021, Maret 2022, dan Juni 2022.

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder:

a. Sumber data primer menurut Sugiyono (2011:225) adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini

diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pihak yang terkait dalam hal ini pegawai bagian kredit pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Utama. Data primer yang digunakan dapat berupa informasi tentang perusahaan, proses pemberian kredit dan data kredit bermasalah.

- b. Sumber data sekunder menurut Sugiyono (2011:225) adalah merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data tersebut dapat diperoleh dari data kredit bermasalah dan dokumen lain yang mendukung penelitian ini.

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan, karena data yang dihasilkan akan dipergunakan untuk menjawab masalah penelitian (Nazir, 2009:174). Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Wawancara semi terstruktur, Menurut Sugiyono (2010:233) mengemukakan bahwa wawancara semi terstruktur adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, ide-idenya. Dasar pertimbangan pemilihan wawancara semi terstruktur karena pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur sehingga akan timbul keakraban antara peneliti dan responden yang ada pada akhirnya akan memudahkan peneliti dalam menghimpun data.
- b. Dokumentasi, Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara melihat langsung dan mempelajari laporan perubahan Non Performing Loan, dokumen dan arsip sistem akuntansi pemberian kredit multiguna, catatan-catatan kredit macet, serta data kredit bermasalah yang ada pada perusahaan sesuai dengan masalah yang diteliti.

Metode analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis deskriptif yang menggambarkan sistem akuntansi pemberian kredit multiguna dan kredit bermasalah bank dengan cara melihat sistem kredit pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Utama. Langkah-langkah analisis data yang akan dilakukan peneliti untuk mengetahui sistem akuntansi pemberian kredit multi guna untuk meminimalisir kredit bermasalah adalah dengan menganalisis sistem akuntansi pemberian kredit multi guna yang telah diterapkan.

#### **4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **Hasil Penelitian**

Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara didirikan pada tanggal 02 Maret 1968 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 34 Tahun 1968 tentang Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara dan mendapatkan izin operasional dari Menteri Keuangan No.D,15.6.1.18 tanggal 27 Januari 1970, yang kemudian telah diubah dengan Perda No.1 tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981, Perda No. 2 tahun 1988 tanggal 8 April 1988 dan Perda No.2 tahun 1993 tanggal 13 Februari 1993.

Sejalan dengan adanya perubahan peraturan dan ketentuan perbankan khususnya mengenai ketentuan permodalan bagi Bank Umum sebagaimana dimaksud oleh Arsitektur Perbankan Indonesia (API) maka ketentuan pendirian BPD Sulawesi Tenggara dilakukan penyesuaian yang dituangkan dalam Perda No. 5 tahun 2003 tanggal 12 September 2003 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 10 tahun 2004 tanggal 21 September 2004 dengan merubah ketentuan tentang modal dasar BPD Sulawesi Tenggara dari Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) menjadi Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar rupiah) kemudian dirubah dengan Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2011 tanggal 20 April 2011 tentang modal dasar Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara dari Rp.750.000.000.000,- (tujuh ratus lima puluh milyar rupiah).

Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan dan pengembangan usaha maka BPD Sulawesi Tenggara berubah status dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-4439.AH.01.01 tanggal 23 Agustus 2013.



1. Visi

Menjadi Bank berdaya saing tinggi dan kuat di Sulawesi Tenggara tahun 2024

2. Misi

1. Meningkatkan kemampuan bisnis dan pelayanan ;
2. Meningkatkan ketahanan kelembagaan ;
3. Meningkatkan kontribusi terhadap pembangunan daerah.

Dalam mencapai visi dan misi tersebut, Bank Sultra terus berusaha memberikan layanan keuangan berkualitas sesuai dengan kebutuhan nasabah, dengan dilengkapi sumber daya manusia yang berkualitas serta teknologi dan sistem kerja yang mendukung peningkatan kinerja. Untuk itu, kebijakan tata kelola perusahaan dalam rangka mencapai tujuan bisnis bank yang diinginkan telah lama ditetapkan dan diterapkan secara konsisten.

Pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* selama ini telah menjadi perhatian utama manajemen Bank Sultra, sebagai proses berkesinambungan yang bertujuan untuk:

1. Meningkatkan efisiensi kinerja Bank dengan meningkatkan pelayanan kepada pemangku kepentingan dengan Bank, yang tidak hanya terbatas pada nasabah, melainkan juga kepada regulator, pemerintah, karyawan, dan pemegang saham.
2. Meningkatkan kepercayaan pihak-pihak yang berkepentingan dengan Bank.
3. Melindungi Bank dari potensi tuntutan hukum, yang disebabkan oleh ketidakpatuhan Bank terhadap ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku.

Oleh sebab itu, Laporan Pelaksanaan GCG merupakan bentuk transparansi kondisi keuangan dan non keuangan kepada publik sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 5/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum yang mewajibkan bank-bank agar dalam melaksanakan kegiatan usahanya senantiasa berpedoman pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (Transparansi, Akuntabilitas, *Responsibility*, Independensi, *Fairnes*), serta melakukan *self assessment* terhadap kecukupan pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan menyusun laporan pelaksanaannya untuk disajikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pihak-pihak lainnya.

### Kredit Multiguna

Kredit Multiguna disalurkan kepada debitur perorangan dengan tujuan penggunaan sesuai kebutuhan debitur yang pengembaliannya bersumber dari penghasilan debitur yang bersifat tetap.

1) **Manfaat**

1. Persyaratan mudah
2. Proses Cepat.
3. Suku bunga yang kompetitif
4. Metode digunakan flat menguntungkan dibandingkan suku bunga annuitas.

2) **Risiko**

1. Berlaku denda untuk keterlambatan pembayaran angsuran.
2. Apabila debitur memberikan keterangan palsu/tidak benar sebagaimana yang dilampirkan pada permohonan kredit, maka debitur wajib melunasi seluruh pinjaman.

3) **Biaya**

Uraian	Biaya
Biaya Provisi	1 % dari plafond
Biaya Premi Asuransi	Sesuai jangka waktu permohonan
Biaya BADL	Rp. 150.000

4) **Simulasi, Nasabah**

Jangka Waktu/Bulan	12	24	36	48	60	72
50,000,000	4,604,167	2,520,833	1,826,389	1,479,167	1,270,833	1,131,944
55,000,000	5,064,583	2,772,917	2,009,028	1,627,083	1,397,917	1,245,139
60,000,000	5,525,000	3,025,000	2,191,667	1,775,000	1,525,000	1,358,333
65,000,000	5,985,417	3,277,083	2,374,306	1,922,917	1,652,083	1,471,528
70,000,000	6,445,833	3,529,167	2,556,944	2,070,833	1,779,167	1,584,722
75,000,000	6,906,250	3,781,250	2,739,583	2,218,750	1,906,250	1,697,917
80,000,000	7,366,667	4,033,333	2,922,222	2,366,667	2,033,333	1,811,111

5) **Angsuran Anuitas**

Anuitas						
Plafont	Jangka Waktu					
	12	24	36	48	60	72
50,000,000	4,442,440	2,353,674	1,660,716	1,316,692	1,112,223	977,510
55,000,000	4,886,684	2,589,041	1,826,788	1,448,361	1,223,445	1,075,261
60,000,000	5,330,928	2,824,409	1,992,859	1,580,031	1,334,667	1,173,012
65,000,000	5,775,172	3,059,776	2,158,931	1,771,700	1,445,890	1,270,763
70,000,000	6,219,416	3,295,144	2,325,002	1,843,369	1,557,112	1,368,514
75,000,000	6,663,660	3,530,511	2,491,074	1,975,038	1,668,334	1,466,265
80,000,000	7,107,904	3,765,878	2,657,145	2,106,707	1,779,556	1,564,016

6) **Suku Bunga**

Suku bunga mengikuti aturan yang berlaku pada saat persetujuan/realisasi kredit. Tabel angsuran diatas dipakai untuk suku bunga sekarang 10.50% flat dan 12% annuitas bulanan, suku bunga Bank Sultra disesuaikan pada saat Perjanjian Kredit.

7) **Persyaratan Umum**

1. Hasil informasi debitur baik yang bersumber dari internal bank maupun dari Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)
2. NPWP perorangan untuk debitur dengan Plafond > Rp. 50 Juta.
3. Pas Foto ukuran 3 X 4 cm Suami/Isteri yang terbaru masing-masing sebanyak 1 lembar.
4. Foto Copy Kartu tanda Pengenal (KTP) Suami/Isteri yang masih berlaku
5. Foto Copy akta Nikah/Surat Nikah bagi debitur yang sudah menikah.
6. Foto Copy Akta Cerai bagi debitur yang sudah cerai
7. Surat Keterangan Meninggal Dunia (pasangan debitur yang telah meninggal dunia)
8. Foto copy Kartu Keluarga.
9. Wajib memiliki rekening simpanan pada PT. BPD Sultra

10. Permohonan, Daftar gaji, Keterangan Aktif Bekerja dan Fc SK 80%/100%/KPE/SK kenaikan golongan/pangkat, (Gaji melalui Bank Sultra)
11. Kenaikinan Pangkat dan/atau Jabatan atau SK kenaikan berkala dan/atau data taspen, SK 80% Asli dan Fc SK terakhir. (Gaji Tidak melalui Bank Sultra)

#### **8) Tata cara**

Petani/Calon Debitur/Debitur harus memenuhi Persyaratan Umum dan melengkapi Persyaratan Dokumen untuk mengajukan permohonan fasilitas kredit ini.

#### **9) Prosedur Permohonan Kredit**

Nasabah datang ke Bank Sultra membawa formulir permohonan kreditnya yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Bendahara Gaji Instansi, surat atau permohonan tersebut ditujukan kepada pimpinan yang akan diserahkan melalui *Account Officer* disertai dengan syarat-syarat yang diperlukan untuk pengajuan kredit multiguna. Dalam hal ini, formulir merupakan unsur sistem akuntansi yang diterapkan Bank Sultra sebagai dokumen untuk merekam terjadinya proses pemberian kredit multiguna. Dengan formulir ini peristiwa yang terjadi dalam pemberian kredit multiguna bank Sultra dapat direkam (didokumentasikan) diatas secarik kertas.

#### **10) Prosedur Verifikasi**

Unsur sistem akuntansi yang diterapkan bank Sultra pada tahap prosedur verifikasi yaitu melakukan penjurnalan dimana bank mencatat, mengklasifikasikan dan meringkas berkas permohonan kredit untuk dilakukan perhitungan plafond calon debitur. Dalam jurnal ini, berkas permohonan kredit diklasifikasikan menurut penggolongan yang sesuai dengan informasi dari calon debitur.

#### **11) Prosedur Realisasi**

Unsur sistem akuntansi yang diterapkan bank Sultra pada tahap ini yaitu buku besar terdiri dari berkas-berkas yang digunakan untuk dilakukan analisis. Tahap buku besar ini digunakan sebagai wadah untuk menggolongkan berkas permohonan kredit dan juga sebagai sumber informasi data calon debitur untuk penyajian keputusan kredit diterima atau ditolak. Analisis Kredit menerima berkas permohonan kredit dan hasil wawancara dari *Account Officer* (AO) untuk dilakukan analisis berkas permohonan kredit dari nasabah, yang nantinya dapat dijadikan acuan dalam memutuskan kredit yang diajukan nasabah ke bank, dengan keputusan diterima atau ditolak.

#### **12) Prosedur Pencairan Kredit**

Unsur sistem akuntansi yang diterapkan bank Sultra pada tahap ini adalah melakukan proses pencatatan ke buku pembantu ini terdiri dari berkas-berkas permohonan kredit nasabah atau calon debitur yang merinci keabsahan dokumen kredit. Jika dokumen yang diperlukan rinciannya lebih lanjut, dapat dibentuk buku pembantu. Buku pembantu dan buku besar disebut sebagai catatan akuntan di akhir juga karena setelah dokumen dicatat dalam buku-buku tersebut, proses akuntansi selanjutnya adalah penyajian laporan keuangan akibat adanya proses pencairan kredit. Setelah semua dokumen-dokumen lengkap dan sudah mendapat persetujuan dari analisis kredit maka petugas Administrasi Kredit (ADK) membuat nota kredit yang akan diberikan kepada nasabah nantinya agar kredit cair.

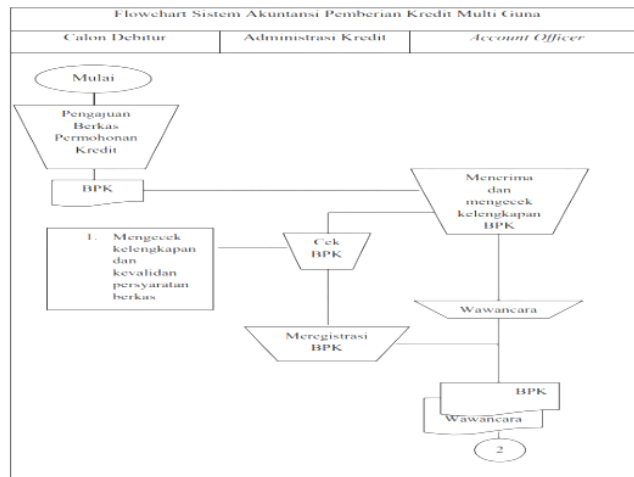
#### **13) Prosedur Pelunasan Fasilitas Kredit**

Pada tahap ini setelah dilakukan pelunasan dari nasabah maka pihak bank menerapkan sistem akuntansi yaitu membuat laporan dimana hasil akhir proses pelunasan fasilitas kredit, yang berupa laporan keuangan pihak bank seperti laporan neraca, laporan rugi laba, laporan arus kas dan membuat catatan atas laporan keuangan akibat terjadinya pembayaran atau pelunasan kredit dari debitur atau nasabah. Pelunasan fasilitas kredit dilakukan nasabah dengan cara angsuran setiap bulan dengan sistem potong gaji sesuai dengan ketentuan awal perjanjian mengenai besarnya angsuran. Jika kredit yang dipinjam telah lunas maka dokumen-dokumen jaminan yang diserahkan nasabah ke bank dapat



diambil oleh nasabah setelah nyata-nyata nasabah menyelesaikan semua kewajibannya.

**14) Flowchart Pemberian Kredit Multiguna oleh PT Bank Sultra**



Gambar 1. Flowchart Pemberian Kredit Multiguna

Gambar flowchart di atas mengenai pemberian kredit multiguna mulai dari tahap permohonan kredit, tahap verifikasi, tahap penolakan dan penerimaan kredit, tahap pencairan kredit serta tahap pelunasan kredit yang ada pada PT. Bank Sultra.

**Pembahasan**

Sistem Akuntansi dan Prosedur Pemberian Kredit Multiguna PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Utama.

No.	Prosedur Pemberian Kredit Multiguna Bank Sultra Cabang Utama	Sistem Akuntansi	Kriteria
1.	Prosedur Permohonan Kredit oleh bagian <i>Account Officer</i> dan Administrasi Kredit	Formulir merupakan unsur sistem akuntansi yang diterapkan Bank Sultra sebagai dokumen untuk merekam terjadinya proses pemberian kredit multiguna. Dengan formulir ini peristiwa yang terjadi dalam pemberian kredit multiguna bank Sultra dapat direkam (didokumentasikan) diatas secarik kertas.	Cukup Baik
2.	Prosedur Verifikasi Kredit oleh bagian <i>Account Officer</i> dan Administrasi Kredit	Unsur sistem akuntansi yang diterapkan bank Sultra pada tahap prosedur verifikasi kredit yaitu melakukan penjurnalan dimana bank mencatat, mengklasifikasikan dan meringkas berkas permohonan kredit untuk dilakukan perhitungan plafond calon debitur. Dalam jurnal ini, berkas permohonan kredit diklasifikasikan menurut penggolongan yang sesuai dengan informasi dari calon debitur.	Cukup Baik
3.	Prosedur Realisasi Kredit oleh bagian <i>Account Officer</i>	Unsur sistem akuntansi yang diterapkan bank Sultra pada tahap ini yaitu buku besar terdiri dari berkas-berkas yang digunakan untuk dilakukan analisis. Tahap buku besar ini digunakan sebagai wadah untuk	Cukup Baik

		menggolongkan berkas permohonan kredit dan juga sebagai sumber informasi data calon debitur untuk penyajian keputusan kredit diterima atau ditolak.	
4.	Prosedur Pencairan Kredit oleh bagian Analisis Kredit	Unsur sistem akuntansi yang diterapkan bank Sultra pada tahap ini adalah melakukan proses pencatatan ke buku pembantu ini terdiri dari berkas-berkas permohonan kredit nasabah atau calon debitur yang merinci keabsahan dokumen kredit. Jika dokumen yang diperlukan rinciannya lebih lanjut, dapat dibentuk buku pembantu. Buku pembantu dan buku besar disebut sebagai catatan akuntan di akhir juga karena setelah dokumen dicatat dalam buku-buku tersebut, proses akuntansi selanjutnya adalah penyajian laporan keuangan akibat adanya proses pencairan kredit.	Cukup Baik
5.	Prosedur Pelunasan Kredit oleh bagian Administrasi Kredit	Pada tahap ini setelah dilakukan pelunasan dari nasabah maka pihak bank menerapkan sistem akuntansi yaitu membuat laporan dimana hasil akhir proses pelunasan fasilitas kredit, yang berupa laporan keuangan pihak bank seperti laporan neraca, laporan rugi laba, laporan arus kas dan membuat catatan atas laporan keuangan akibat terjadinya pembayaran atau pelunasan kredit dari debitur atau nasabah.	Cukup Baik

## 5. KESIMPULAN

### Kesimpulan

Kredit Multiguna (KMG) adalah fasilitas kredit yang diberikan kepada individu yang memiliki pendapatan atau penghasilan tetap maupun tidak tetap, yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan konsumtif (*consumptive purpose*) yang tidak dapat dilayani dengan skim Kredit Perumahan (KPR) dan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) maupun kredit konsumtif lainnya.

“Kredit bermasalah adalah kredit yang diklasifikasikan pembayarannya tidak lancar yang dilakukan oleh debitur bersangkutan” (Hasibuan, 2007:115). Kredit bermasalah atau yang biasa disebut dengan *Non Performing Loan (NPL)* merupakan bentuk risiko dari kegiatan bank dalam bentuk penyaluran dana. Arthesa (2006:181) mengemukakan kredit bermasalah secara umum adalah kredit yang mengandung kelemahan atau tidak memenuhi standart kualitas yang telah ditetapkan bank. Kesimpulannya, kredit bermasalah adalah kredit yang pembayarannya tidak lancar yang berasal dari ketidakmampuan debitur untuk membayar angsuran beserta bunga kepada bank sesuai perjanjian atau dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Dari hasil pembahasan yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem akuntansi pemberian kredit multi guna pada Bank Sultra Cabang Utama sebagai salah satu upaya meminimalisir kredit bermasalah telah terlaksana dengan cukup baik, hal itu dapat dilihat dari penerapan sistem akuntansi pemberian kredit multi guna pada Bank Sultra Cabang Utama berjalan cukup baik. Hal itu dapat dilihat dari petugas yang terlibat sangat kompeten dan dapat dipercaya. Mereka sudah dibekali pengetahuan dan kemampuan yang dibangun dari program-program yang telah dijalankan mulai dari perekrutan pegawai hingga evaluasi kinerja setiap harinya oleh ketua bidang. Selain itu juga bisa dilihat dari pemisahan tugas para karyawan sehingga mencerminkan manajemen kredit yang baik. Namun, juga ada kekurangan dari sistem akuntansi yang telah

dijalankan yaitu pada prosedur verifikasi petugas tidak mewajibkan pengecekan BI *Checking* terhadap calon debitur dan belum adanya koordinasi yang baik antara petugas administrasi kredit dan petugas *account officer* mengenai pengarsipan SK yang digunakan untuk mengikat nasabah terhadap bank selain rekening gaji nasabah.

### **Implikasi**

Dalam penyelesaian penelitian ini, yang terlibat langsung adalah Pegawai Bank SULTRA. Khususnya Divisi Kredit yang telah memberikan Informasi tentang Teori Penerapan Sistem Akuntansi Pemberian Kredit Multiguna

### **Keterbatasan**

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Beberapa proses pengolahan data pada perusahaan bersifat Rahasia.
2. Penelitian yang dilakukan hanya berdasarkan data yang umum di publikasikan Perusahaan.
- 3.

### **Rekomendasi**

1. Pada Bank Sultra Cabang Utama tidak mewajibkan pengecekan BI *Checking* dan BKN (jika PNS) kepada calon debitur dalam prosedur verifikasi. BI *Checking* merupakan daftar hitam seorang calon debitur sedang ada pinjaman apa saja dan kolektibilitas berapa. Sebaiknya dalam prosedur verifikasi kredit dilakukan pengecekan pada BI *Checking* dan BKN (jika PNS). Dua hal itu dapat digunakan sebagai pertimbangan analisis kredit dalam memberikan putusan kredit agar tidak salah.
2. Tidak adanya formulir surat tanda terima SK yang merupakan salah satu syarat lengkapnya berkas permohonan kredit. Sebaiknya ada formulir surat tanda terima SK untuk membantu petugas administrasi kredit dalam mengarsip SK dan untuk menghindari tuduhan dari calon debitur yang lupa sudah mengambil SK atau belum. Dengan adanya surat tanda terima SK tersebut pihak bank tidak dapat dikambinghitamkan ketika ada tuduhan dari calon debitur.
- 3.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Baridwan, Z. (2002). *Sistem Akuntansi Penyusunan Prosedur dan Metode*, Yogyakarta: BPFE.
- Indrajit. (2001). *Analisis dan Perancangan Sistem Berorientasi*. Informatika, Bandung.
- Kasmir. (2012). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Rajawali Pers.
- Krismiaji. (2002). *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta: AMPYKPN.
- Malayu, H. (2006). *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong, L. J. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi. (2001). *Sistem Informasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nazir, M. (2009). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Putra, E. (1989). *Kredit Perbankan*. Yogyakarta: Liberty.
- Sinungan. (1983). *Dasar-Dasar dan Teknik Manajemen Kredit*. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Sugiyono. (1999). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Suyatno, T. (1991). *Dasar-Dasar Perkreditan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Tawaf, T. P. (1999). *Audit Intern Bank Buku Satu*. Jakarta: Salemba Empat.
- Teguh, W. (2004). *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Miles, M. B., dan Huberman, A. M. (2007). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UI Press.

- Sa'adah, A. D. A. (2015). Analisis Sistem Pemberian Kredit Multiguna Dalam Upaya Meningkatkan Pengendalian Kredit . *PT. Bank Jatim Tbk Cabang Lamongan. Jurnal Akuntansi*. [analisis sistem dan prosedur pemberian kredit multiguna dalam upaya meningkatkan pengendalian kredit - pdf free download \(adoc.pub\)](#)
- Lestari, D. P. D. T. (2013). Analisis Sistem dan Prosedur Pemberian Kredit Multiguna Dalam Upaya Meningkatkan Pengendalian Kredit. *PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Madiun. Jurnal Manajemen*. [analisis sistem dan prosedur pemberian kredit multiguna dalam upaya meningkatkan pengendalian kredit \(studi pada pt. bank pembangunan daerah jawa timur cabang madiun\) - neliti](#)
- Hariesti, N. G. (2019). Analisis Sistem dan Prosedur Pemberian Kredit Multiguna Dalam Upaya Meningkatkan Pengendalian Kredit . *PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Singaraja. Jurnal Manajemen*. [article.php \(kemdikbud.go.id\)](#)
- Sari, M. H., Justawan, H. N. (2017). Analisis Performing Loan (Kredit Bermasalah) Terhadap Pemberian Kredit. *Bank Sulawesi Tenggara (SULTRA). Jurnal Akuntansi*. [article.php \(kemdikbud.go.id\)](#)
- Hani, N. (2018). Analisis Pengambilan Keputusan Dalam Rangka Pemberian Kredit Multiguna Terhadap Pegawai Negeri Sipil. *PT. Bank Sultra Cabang Utama Kendari. Jurnal Administrasi Bisnis*. [analisis pengambilan keputusan dalam rangka pemberian kredit multiguna terhadap pegawai negeri sipil \(studi pada pt. bank sultra cabang utama kendari\) \(researchgate.net\)](#)
- Yolla, A. (2019). Analisis Prosedur Pemberian Kredit Multu Guna (KMG) Pada PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Sukaramai. *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan*, diakses pada tanggal 8 November 2022 dari <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/6805>
- Oktaviani, I. (2014). Prosedur Pemberian Kredit Multi Guna (KMG) Terhadap Golongan Penghasilan Tetap Studi Kasus PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Bogor Dewi Sartika. *Skripsi Manajemen Studi Keuangan dan Perbankan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesatuan Bogor*, diakses pada tanggal 8 November 2022 dari <https://media.neliti.com/media/publications/296890-prosedur-pemberian-kredit-multi-guna-kmg-4c4eaa2f.pdf>
- Argitasari, N. (2013). Analisis Sistem Akuntansi Pengajuan, Pemberian, Dan Penerimaan Kas Atas Angsuran Kredit Multiguna Dalam Upaya Meningkatkan Pengendalian Internal. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB). Vol. 5. No. 1. Hal. 1-10. Malang : Universitas Brawijaya*. [article.php \(kemdikbud.go.id\)](#)
- (UU) 1998. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Bank Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/11/DPNP Tanggal 31 Maret 2010
- Bank Sultra. “Kredit Multiguna”, diakses pada tanggal 15 Oktober 2022 dari [Bank Sultra - Kredit Multiguna](#) Bank Sultra, “Profil Bank Jatim”, diakses pada tanggal 16 Oktober 2022 dari [Bank Sultra](#)